

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM MENEKAN
RISIKO *STUNTING* DI KOTA PALEMBANG
(Studi kasus pada Kecamatan Ilir Timur II)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**PARINDA TIA ANDINI
NIM. 07011381924209**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
OKTOBER 2023**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Parinda Tia Andini

NIM : 07011381924209

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance dalam Menekan Risiko Stunting di Kota Palembang (Studi kasus pada Kecamatan Ilir Timur II)*” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Palembang, 18 Juli 2023



Parinda Tia Andini

NIM. 07011381924209

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENEKAN RISIKO STUNTING DI KOTA PALEMBANG (Studi kasus pada Kecamatan Ilir Timur II)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

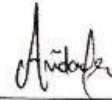
Oleh:

**PARINDA TIA ANDINI
NIM. 07011381924209**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 18 Juli 2023

Pembimbing

Annada Nasyaya S.IP., M.Si
NIP. 198809062019032016



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENEKAN RISIKO STUNTING DI KOTA PALEMBANG (Studi kasus pada Kecamatan Ilir Timur II)

SKRIPSI


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal 26 Juli 2023
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Annada Nasyaya, S.IP., M.Si

NIP. 198809062019032016


Ketua



Dr. Nurmah Semil, M.Si

NIP. 196712011992032002

Anggota



Anang Dwi Santoso, S.AP., M.AP

NIP. 199310072019031012

Anggota



Mengetahui,

 <p>Prof. Dr. Alfieri, M.Si NIP. 196601221990031004</p>	<p>Ketua Jurusan</p>  <p>Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001</p>
---	--

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Don’t rush the process. Good things take time.”

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini
dipersembahkan untuk:

- Kedua Orang Tua
- Mas dan Mbak
- Keluarga tercinta
- Teman-temanku
- Almamater

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Menekan Risiko *Stunting* di Kota Palembang (Studi kasus pada Kecamatan Ilir Timur II)”. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana strata-1 (S1) di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan dukungan yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat diperbaiki pada penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi yang membutuhkan.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas segala nikmat yang telah diberikan.
2. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai, Papa Supami dan Mama Lubia, serta mas dan mbakku tersayang, terima kasih yang tak terhingga, atas semua doa yang selalu kalian panjatkan, dukungan yang tiada henti-hentinya baik materiil dan imateriil, motivasi, serta kasih sayang yang begitu besar untuk segala-galanya.
3. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN.Eng. beserta jajarannya.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si beserta jajarannya.
5. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA dan Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administari Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing akademik.
7. Ibu Annada Nasyaya, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, kritis, saran, dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya selama masa studi.
9. Seluruh staf dan karyawan di Jurusan Administrasi Publik, bagian tata usaha, dan ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam semua proses yang diperlukan.
10. Seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu kalian berikan selama ini.
11. Sahabat-sahabatku Aini, Aza, Nadya, Renny, dan Anggis yang sudah menemani dan mewarnai kehidupan kampusku mulai dari mahasiswa baru sampai sekarang.

12. Manusia baik yang selalu mendukung, membantu, memotivasi, dan mendengarkan keluh kesahku selama proses tugas akhir ini, Thalina, Manda, Ejak, Intan, Tiurma, dan Indri.
13. Teman-teman di Jurusan Administrasi Publik Angkatan 2019 yang telah menemani selama perkuliahan.
14. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus memberikan motivasi dan do'a serta skripsi ini dapat diselesaikan.
15. Dan terakhir terima kasih untuk diriku sendiri. Terima kasih sudah mau berjuang, bertahan, menunggu, dan bersabar sejauh ini.

Semoga Allah SWT membalas semua yang telah kalian berikan kepada penulis dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini.

Palembang, 19 Juli 2023



Parinda Tia Andini
NIM. 07011381924209

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam menekan risiko *stunting* di Kota Palembang (Studi kasus pada Kecamatan Ilir Timur II). Adanya peningkatan angka *stunting* di Kecamatan Ilir Timur II membuat pemerintah melakukan kerjasama dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, teori *collaborative governance* milik Ansell dan Gash (2008) digunakan, dengan empat variabel yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam menekan risiko *stunting* di Kecamatan Ilir Timur II masih menghadapi kendala dikarenakan peran kepemimpinan masih belum maksimal. Namun, kolaborasi ini telah memberikan dampak positif dalam menekan angka *stunting* di Kecamatan Ilir Timur II. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, saran yang dapat peneliti berikan adalah meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan tentang dampak negatif *stunting* kepada masyarakat secara luas, dengan memanfaatkan teknologi modern seperti media sosial.

Kata Kunci : *Collaborative Governance*, Menekan Risiko, dan *Stunting*.

Pembimbing,

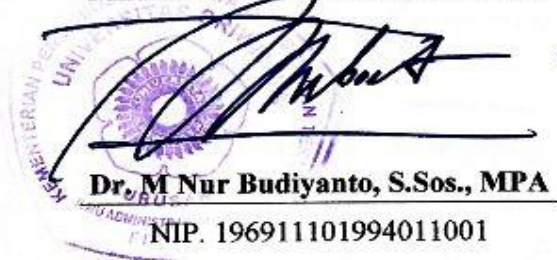



Annada Nasyaya S.IP., M.Si

NIP. 198809062019032016

Palembang, 19 Juli 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



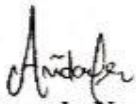
Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This research aims to investigate collaborative governance in mitigating the risk of stunting in Palembang City (A case study in the District of Ilir Timur II). The increasing prevalence of stunting in the District of Ilir Timur II has led the government to collaborate in addressing this issue. The research adopts a descriptive-qualitative approach, utilizing data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The study employs Ansell and Gash's (2008) theory of collaborative governance, incorporating four variables: initial conditions, facilitative leadership, institutional design, and collaborative processes. The findings reveal that collaborative governance in reducing the risk of stunting in the District of Ilir Timur II still encounters challenges due to suboptimal leadership roles. Nevertheless, this collaboration has demonstrated positive impacts in lowering stunting rates in the District of Ilir Timur II. Based on the data analysis, the researchers recommend enhancing the dissemination of information and awareness about the negative consequences of stunting to the broader community, utilizing modern technologies such as social media.

Keywords : Collaborative Governance, Risk reduction, and Stunting.

Pembimbing,



Annada Nasyaya S.IP., M.Si

NIP. 198809062019032016

Palembang, 19 Juli 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Teori <i>Collaborative Governance</i>	12
2.1.1 Definisi <i>Collaborative</i>	12
2.1.2 Definisi <i>Governance</i>	13
2.1.3 Definisi <i>Collaborative Governance</i>	14
2.1.4 Tujuan Pelaksanaan <i>Collaborative Governance</i>	16
2.1.4 Model <i>Collaborative Governance</i>	17
2.2 <i>Stunting</i>	27
2.2.1 Pengertian <i>Stunting</i>	27

2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab <i>Stunting</i>	28
2.2.3 Dampak <i>Stunting</i>	30
2.3 Penelitian Terdahulu.....	31
2.4 Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Definisi Konsep.....	38
3.3 Fokus Penelitian	39
3.4 Jenis dan Sumber Data	40
3.5 Informan Penelitian	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data	41
3.7 Teknik Analisis Data	42
3.8 Jadwal Penelitian	45
3.9 Sistematika Penulisan.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.2 Deskripsi Informan Penelitian.....	58
4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	59
4.3.1 Kondisi Awal (<i>Starting Coditions</i>).....	60
4.3.2 Kepemimpinan Fasilitatif (<i>Facilitative Leadership</i>)	72
4.3.3 Desain Kelembagaan (<i>Institutional Design</i>).....	80
4.3.4 Proses Kolaboratif (<i>Collaborative Process</i>).....	87
4.4 Diskusi.....	104
BAB V PENUTUP	108
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekap Balita <i>Stunting</i> di Kota Palembang Per Kecamatan Tahun 2021-2022.....	6
Tabel 1. 2 Peran Masing-Masing Organisasi Pemerintah dalam Menekan Risiko <i>Stunting</i> di Kota Palembang.	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	39
Tabel 3. 2 Informan Penelitian.....	41
Tabel 4. 1 Data Informan Penelitian	58
Tabel 4. 2 Rekap Hasil Analisis Data dan Pembahasan.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Aktor dalam Kolaborasi Menekan Risiko <i>Stunting</i> di Kota Palembang	10
Gambar 2. 1 Model <i>Collaborative Governance</i> Ansell dan Gash (2008)	18
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 3. 1 Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif	43
Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Ilir Timur II	47
Gambar 4. 2 Penandatanganan Nota Kesepahaman Menekan Risiko <i>Stunting</i> dengan Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah	61
Gambar 4. 3 Sertifikat Siap Nikah dan Hamil (Elsimil)	64
Gambar 4. 4 Pemberian Bantuan Makanan Tambahan di Kecamatan Ilir Timur II	64
Gambar 4. 5 Penghargaan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dari Kepala BKKBN RI	68
Gambar 4. 6 Rapat Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan di masa lalu	71
Gambar 4. 7 Nota Kesepahaman dalam Pendampingan, Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan 3 (Tiga) Bulan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan <i>Stunting</i> dari Hulu	73
Gambar 4. 8 Wakil Walikota Palembang memimpin Rapat <i>Stunting</i>	75
Gambar 4. 9 Isi SK Walikota Palembang	77
Gambar 4. 10 Sosialisasi dari Penyuluh di KUA	79
Gambar 4. 11 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021	81
Gambar 4. 12 Keputusan Walikota Palembang Nomor 48 Tahun 2022	82
Gambar 4. 13 Publikasi Data <i>Stunting</i> pada Website Dinas Kesehatan	85
Gambar 4. 14 Lokakarya Triwulan Lintas Sektor Tingkat Kecamatan Ilir Timur II	87
Gambar 4. 15 Rapat Diskusi di Kecamatan Ilir Timur II	92
Gambar 4. 16 Pemberian Makanan Tambahan di Kecamatan Ilir Timur II	95
Gambar 4. 17 Rapat Diskusi di Kecamatan Ilir Timur II	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas Skripsi.....	114
Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	115
Lampiran 3 : Kartu Revisi Sempro	116
Lampiran 4 : Kartu Revisi Kompre.....	117
Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian	118
Lampiran 6 : Surat Balasan Izin Penelitian.....	124
Lampiran 7 : Nota Kesepahaman tentang Pendampingan, Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan 3 (Tiga) Bulan Pra-Nikah sebagai Upaya Pencegahan <i>Stunting</i> dari Hulu	127
Lampiran 8 : SK Walikota Palembang Nomor 48 tentang Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	128
Lampiran 9 : Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	129
Lampiran 10 : Dokumentasi Wawancara Penelitian.....	130

DAFTAR SINGKATAN

ASI	: Air Susu Ibu
BBLR	: Berat Badan Lahir Rendah
BIMAS	: Bimbingan Masyarakat Islam
DINKES	: Dinas Kesehatan
DPPKB	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
ELSIMIL	: Elektronik Siap Nikah dan Hamil
IBI	: Ikatan Bidan Indonesia
IT	: <i>Information and Technology</i>
JFU	: Jabatan Fungsional Umum
KASSUBAG	: Kepala subBagian Umum dan Kepegawaian
KEP	: Kekurangan Energi Protein
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KUA	: Kantor Urusan Agama
MPASI	: Makanan Pendamping Asi
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
Plt	: Pelaksana Tugas
PMT	: Pemberian Makanan Tambahan
SD	: Standar Deviasi
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SSGI	: Survei Status Gizi Indonesia
TB/U	: Tinggi Badan/Umur
TTD	: Tablet Tambah Darah
WHO	: <i>World Health Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di sejumlah negara yang tengah menjalani perkembangan, termasuk Indonesia, masalah gizi menjadi masalah yang kerap terjadi terutama dalam bentuk kekurangan gizi. Ketersediaan gizi yang cukup memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan serta perkembangan manusia sehingga dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Dengan asupan gizi yang mencukupi, seseorang dapat mencapai kemampuan maksimalnya (Probohastuti & Rengga, 2019). Aspek yang menentukan kualitas sumber daya manusia satu diantaranya adalah kondisi nutrisi yang dimiliki (Saputri, 2019).

Salah satu indikator kondisi gizi pada anak balita adalah keberhasilan dalam mencapai target kesehatan yang ditetapkan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*). Masa usia anak antara 0-5 tahun adalah periode rentan mengenai persoalan kekurangan gizi, salah satu contohnya yakni *stunting*. Masalah gizi utama yang menjadi perhatian adalah *stunting* yang dapat berpengaruh pada aspek sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. *Stunting* bisa terjadi mulai dari janin di dalam kandungan karena kekurangan asupan zat gizi yang dibutuhkan terutama selama masa kehamilan, serta dipengaruhi oleh kondisi lingkungan (Putri & Habibie, 2022). Masalah kekurangan energi protein (KEP) ialah persoalan gizi utama yang dapat memberikan efek pada proses pertumbuhan dan perkembangan fisik dan kognitif pada anak. Kekurangan asupan energi dan protein selama periode yang panjang dapat menghambat pertumbuhan anak balita (Diniyah & Nindya, 2017).

Menurut hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2021, prevalensi *stunting* mencapai 24,4% (Litbangkes, 2021). Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di atas target dunia yang menetapkan penurunan prevalensi *stunting* menjadi di bawah 20%. Diperlukan program-program dari kementerian dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk mencapai target menurunkan prevalensi *stunting* pada tahun 2024, yaitu sebesar 14%. Hal ini menunjukkan perlunya upaya terus menerus untuk menangani masalah *stunting* di Indonesia (Litbangkes, 2021). Masalah gizi merupakan permasalahan kompleks yang terjadi di setiap tahap siklus kehidupan dan sangat penting untuk segera menangani masalah *stunting* ini. Masalah gizi dapat terjadi pada berbagai tahap dalam kehidupan mulai dari masa kehamilan, bayi dan balita, remaja, hingga usia lanjut (Putri & Habibie, 2022).

Menangani persoalan gizi yang buruk sangat berhubungan dengan strategi sebuah negara dalam mewujudkan sumber daya manusia yang bugar, cerdas, serta produktif. Hal ini menunjukkan pentingnya peran ketersediaan gizi yang mencukupi dalam pembangunan manusia dan kemajuan suatu negara. Upaya untuk meningkatkan kualitas pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas diawali dari perawatan dan asupan gizi yang baik pada masa pertumbuhan anak, terutama berasal dari konteks keluarga. Hal ini menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam memberikan perhatian khusus terhadap gizi dan kesehatan anak sejak usia dini, sebagai modal dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. (Maulidah, Rohmawati, & Sulistiyani, 2019).

Dengan kondisi tersebut memiliki keluarga yang menciptakan lingkungan sehat bagi anak, kemungkinan adanya risiko terjadinya infeksi menular atau penyakit

lain yang bisa mengganggu kesehatan dan pertumbuhan anak dapat diminimalisir. Pada masyarakat umum, faktor-faktor seperti kebersihan lingkungan yang baik dan sehat, ketersediaan makanan yang mencukupi, cara mendidik anak yang tepat, serta pelayanan utama kesehatan yang baik, banyak berpengaruh dalam membentuk anak yang kuat terhadap masalah kekurangan nutrisi (Fauzan, Nurmalasari, & Anggunan, 2021). Untuk memastikan pelaksanaan hal-hal krusial misal pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pendidikan yang tidak secara langsung dapat mengganti kebiasaan buruk dan pandangan umum di masyarakat dalam hal pengobatan nutrisi bagi keluarga dan anak, diperlukan kejelasan kebijakan, strategi, peraturan, dan koordinasi antar sektor dari pemerintah dan para pemangku kepentingan.

Stunting atau kerdil adalah masalah gizi yang terjadi pada balita, di mana balita mengalami gagal tumbuh karena kekurangan nutrisi yang berkelanjutan, yang mengakibatkan ketinggian tubuh anak balita menjadi lebih pendek dari usianya (Sukanti & Faidati, 2021). Sebagai keseluruhan, *stunting* terjadi sebab kekurangan asupan nutrisi dalam durasi waktu yang panjang dan seringnya terkena infeksi, keduanya terpengaruh oleh model perawatan yang kurang cukup mulai dari selama masa kehamilan hingga 1.000 hari setelah kelahiran (Probohastuti & Rengga, 2019).

Kondisi *stunting* terjadi pada balita ketika mereka tidak tumbuh dengan optimal dan mengalami keterlambatan pertumbuhan, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis akibat kurangnya kuantitas dan kualitas nutrisi yang dikonsumsi dalam periode yang cukup panjang (Fauziah & Novandi, 2021). *Stunting* pada anak-anak balita menggambarkan ketidakberhasilan pertumbuhan dampak dari defisiensi nutrisi akut yang menyebabkan anak menjadi kurang tinggi untuk usia

mereka pada saat itu. Terjadi situasi seperti ini sejak bayi masih dalam masa kehamilan hingga usia 2 tahun (Saputri, 2019). *Stunting* memiliki dampak yang lebih luas daripada sekedar kesehatan anak, tapi juga berakibat pada trend peningkatan efisiensi tenaga kerja manusia atau kemajuan kinerja sumber daya manusia (SDM) di suatu wilayah (Nirmalasari, 2020).

Anak yang memiliki kesehatan, kecerdasan, serta produktivitas yang baik adalah aset yang sangat berharga sebab mereka adalah kelompok penerus yang berperan penting dalam keberhasilan pembangunan di sebuah Kota. Jika anak-anak mengalami kekurangan gizi akut sejak lahir dan masa pertumbuhan, hal tersebut dapat menyebabkan mereka mengalami *stunting*, yang pada akhirnya akan berdampak pada generasi penerus di masa depan (Budiastutik & Rahfiludin, 2019).

Sebuah jurnal ditulis oleh Rini Archda Saputri pada tahun 2019 membahas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan *Stunting* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Hasil studi penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Bangka dan Bangka Barat sudah mengembangkan berbagai program inovatif untuk mempercepat penurunan *stunting* di daerah mereka selain program yang diberikan oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, diperlukan waktu dan proses untuk melihat hasil nyata dari program-program tersebut. Beberapa langkah-langkah yang telah diambil dalam program pencegahan *stunting* yang telah dilaksanakan termasuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak di bawah 5 tahun dan wanita yang sedang mengandung, Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri dan wanita yang sedang mengandung, upaya untuk meningkatkan imunisasi dasar pada bayi dan anak di bawah 5 tahun, pemberian vitamin A untuk anak di bawah 5 tahun,

pemberian *zinc* untuk kejadian diare terutama pada wanita yang sedang mengandung dan anak di bawah 5 tahun.

Menurut sebuah jurnal yang ditulis oleh Sukanti dan Nur Faidati berjudul *Collaborative Governance* dalam Upaya Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Sleman pada tahun 2021, menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* cukup baik dalam dinamika kolaborasi, yaitu keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama secara keseluruhan. Namun, beberapa indikator masih belum berjalan dengan baik, seperti forum komunikasi yang belum tersedia di tingkat Pemerintah Kabupaten dan kurangnya peran swasta.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan, terlihat bahwa masalah kekurangan gizi, termasuk *stunting*, menjadi permasalahan yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan penelitian nasional Indonesia, prevalensi *stunting* masih mencapai 24,4%, yang menunjukkan adanya masalah yang perlu ditangani oleh Pemerintah Kota Palembang. Dalam keseluruhan balita di Palembang yang berjumlah 113.718, hanya 60% yang telah diperiksa dan dari pemeriksaan tersebut, terdapat 4641 balita (7,9%) yang mengalami *stunting*. Dari jumlah balita yang mengalami *stunting* yaitu 1075 balita berusia 0-2 tahun dan 2806 balita berusia 3-5 tahun dari sepuluh wilayah yang tersebar di 18 kecamatan dijadikan sebagai lokus intervensi *stunting* (Praja, 2020).

Data terbaru dari Dinas Kesehatan tentang angka penderita *stunting* di Kota Palembang yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Rekap Balita *Stunting* di Kota Palembang Per Kecamatan Tahun 2021-2022

NO	KECAMATAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		STUNTING	%	STUNTING	%
1	Iilir Barat Dua	17	0,4	15	0,6
2	Gandus	34	0,7	16	0,4
3	Seberang Ulu Satu	64	1,0	67	1,4
4	Kertapati	106	1,7	49	0,8
5	Seberang Ulu Dua	119	1,7	69	0,9
6	Plaju	19	0,3	35	0,6
7	Iilir Barat Satu	59	0,7	28	0,3
8	Bukit Kecil	41	2,4	31	1,0
9	Iilir Timur Satu	21	0,4	17	0,6
10	Kemuning	63	1,3	12	0,2
11	Iilir Timur Dua	14	0,2	29	0,6
12	Kalidoni	89	1,1	29	0,3
13	Sako	38	0,5	26	0,4
14	Sematang Borang	23	0,6	3	0,1
15	Sukarami	17	0,1	21	0,2
16	Alang-Alang Lebar	6	0,1	19	0,3
17	Jakabaring	41	0,7	31	0,6
18	Iilir Timur Tiga	416	8,7	19	0,3
	JUMLAH	1187	1,1	517	0,5

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2021-2022

Meskipun angka prevalensi *stunting* pada tahun 2022 mengalami penurunan, namun masih terlihat sebaran prevalensi *stunting* di Kecamatan yang masih tinggi. Hal ini menandakan bahwa masalah gizi di wilayah tersebut masih belum terselesaikan dan tetap menjadi perhatian utama pemerintah dalam menghadapi kasus *stunting*.

Sejauh ini dalam menekan risiko *Stunting* di Kota Palembang dilakukannya Kerjasama yang sudah banyak melibatkan berbagai pihak baik elemen Pemerintah

maupun elemen Non Pemerintah. Dengan adanya kerjasama lintas sektor tersebut artinya pemerintah menyadari realita yang mendera masyarakat selama ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemerintah, melainkan harus saling bekerjasama dengan berbagai komponen kepentingan dalam rangka mengatasinya. Proses kerjasama antara komponen tersebut dinamakan kolaborasi yang bertujuan untuk saling mengakomodir kepentingan serta saling *share* sumberdaya diantara aktor-aktor yang terlibat itu.

Suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko *stunting* di Kota Palembang ini dilakukannya Kerjasama antar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang, Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Kecamatan Se-Kota Palembang dan Kantor Urusan Agama Se-Kota Palembang telah menandatangani *Memorandum Of Understanding* (MoU) mengenai pencegahan *stunting* guna dapat menekan risiko *stunting* melalui Pendampingan, Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan 3 Bulan Pra Nikah. Dalam hal ini Organisasi Pemerintah yang bekerjasama antara lain adalah :

Tabel 1. 2 Peran Masing-Masing Organisasi Pemerintah dalam Menekan Risiko *Stunting* di Kota Palembang.

INSTANSI	PERAN	
	Pencegahan	Penanganan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang	Memberikan promosi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.	Mendorong keluarga untuk merencanakan kehamilan dengan baik dan memastikan kesehatan ibu dan bayi.
Kantor Kementerian Agama Kota Palembang	Memberikan pendampingan dan konseling.	Memberikan dukungan dan pendampingan pada keluarga dengan balita, khususnya dalam hal pemberian makanan dan perawatan bayi dan anak balita.

INSTANSI	PERAN	
	Pencegahan	Penanganan
Dinas Kesehatan Kota Palembang	Memberikan edukasi masyarakat dalam mencegah risiko <i>stunting</i> .	Memastikan pemahaman yang baik tentang pentingnya gizi seimbang pada ibu hamil, bayi, dan anak balita.
Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang	Melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala.	Memastikan bahwa anak mendapatkan perawatan yang sesuai.
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang	Memberikan informasi, menghimbau, dan memastikan calon pengantin agar melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan pra nikah.	Memastikan bahwa kesehatan calon pengantin telah siap untuk melangsungkan pernikahan sehingga dapat mencegah risiko <i>stunting</i> bagi keturunannya.

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 1.2, Peran yang dimainkan oleh setiap organisasi pemerintah ini tujuannya serupa, yakni mampu menekan risiko *stunting* di Kota Palembang melalui Pendampingan, Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan 3 bulan pra nikah sebagai upaya pencegahan *stunting*. Dalam mengatasi permasalahan *stunting*, pemerintah Kota Palembang menjalin kerjasama dengan organisasi non pemerintah yakni Ikatan Bidan Indonesia (IBI). IBI adalah organisasi tempat peningkatan kualitas SDM, musyawarah maupun *sharing* ilmu dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya bagi ibu dan bayi. Adanya kerjasama ini IBI berperan sebagai pendamping masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman kesehatan seperti, memberikan kekurangan gizi, penerapan kesehatan yang salah, dan lainnya. Dengan adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh IBI diharapkan dapat menjadi wadah dalam mengembangkan kualitas SDM di Kota Palembang.

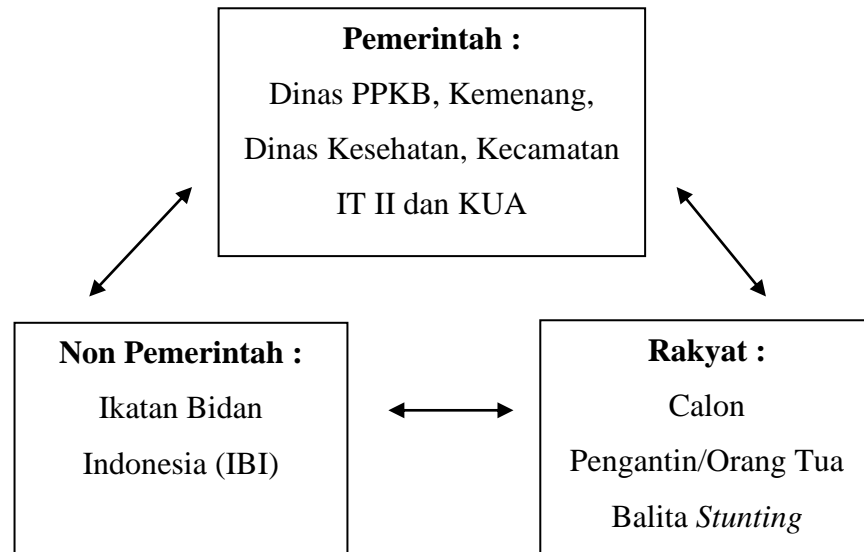
Dalam upaya untuk menekan risiko *stunting* di Kota Palembang, terdapat hambatan dalam pelaksanaan kolaborasi antara Pemerintah dan Non Pemerintah.

Contohnya, di Kecamatan Ilir Timur II masih terlihat peningkatan jumlah balita yang mengalami *stunting*, hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama antara lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, serta kurangnya komitmen dari Pemerintah dalam menangani permasalahan gizi dan *stunting* tersebut. Oleh karena itu, ketika semua pemangku kebijakan, baik Pemerintah maupun pihak Non Pemerintah, dapat menjalankan peran mereka dengan baik dan tercipta kolaborasi yang efektif, maka penanggulangan masalah *stunting* di Kota Palembang bukan hanya sekedar rencana, tetapi benar-benar dapat tercapai dengan baik dan berkelanjutan.

Menurut Ansell dan Gash (2008:544), *Collaborative Governance* merupakan suatu pengorganisasian yang menggabungkan pihak-pihak yang mewakili kepentingan publik dan swasta dengan institusi-institusi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat bersama dan terstruktur, serta berfokus pada mencapai persetujuan dan kesepakatan melalui dialog, dengan tujuan merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan publik. Dalam model *Collaborative Governance* milik Ansell dan Gash terdapat empat variabel utama, yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan dan proses kolaborasi.

Berdasarkan Gambar 1.1, aktor yang terlibat pada *Collaborative Governance* dalam menekan risiko *stunting* di Kota Palembang berasal dari tiga sektor, yakni dari sektor pemerintah, non pemerintah dan juga pihak masyarakat. Berikut ini gambaran pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi:

Gambar 1. 1 Aktor dalam Kolaborasi Menekan Risiko *Stunting* di Kota Palembang



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2023

Berdasarkan fenomena *stunting* yang terjadi, diperlukan sebuah penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai masalah tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama di Kota Palembang dengan tujuan mengurangi jumlah risiko *stunting*. Oleh karena itu, sebuah studi yang diberi judul "*Collaborative Governance* Dalam Menekan Risiko *Stunting* di Kota Palembang (Studi kasus pada Kecamatan Ilir Timur II)" perlu dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu masalah yang dapat diajukan dalam penelitian yaitu bagaimana *collaborative governance* dalam menekan risiko *stunting* di Kota Palembang (Studi kasus pada Kecamatan Ilir Timur II)?

1.3 Tujuan Penelitian

Didasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *collaborative governance* dalam menekan risiko *stunting* di Kota Palembang (Studi kasus pada Kecamatan Ilir Timur II).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya terkait tentang kolaborasi aktor pemerintah dan non pemerintah di daerah lain.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman secara teoritis maupun dengan memperhatikan data yang ditemukan di lapangan.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kota Palembang dalam mengurangi jumlah risiko *stunting* di kota Palembang, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang.
- c. Bagi peneliti di masa depan yang tertarik untuk menginvestigasi isu *stunting* di Kota Palembang, tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi yang berguna dalam bidang ilmu Administrasi Publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. T. (2016). Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik* , Vol. 2 No. 1, 65-72.
- Aceh, D. K. (2019). *Cegah Stunting Itu Penting*. Dipetik Desember 2022, dari <https://dinkes.acehprov.go.id/news/read/2019/02/28/205/cegah-stunting-itu-penting.html>
- Aini, N., Hera, A. G., Anindita, A. I., Maliangkay, K. S., & Amalia, R. (2022). Hubungan Rendahnya Tingkat Ekonomi Terhadap Risiko Terjadinya Stunting . *Jurnal Kesehatan Tambusai* , Vol. 3 No. 2, 127-135.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory* .
- Aridiyah, F. O., Rohmawati, N., & Ririanty, M. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan. *e-Journal Pustaka Kesehatan* , Vol. 3 No. 1, 163-170.
- Arrozaaq, D. L. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Administrasi Negara* .
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (Edisi Pertama ed.). (T. D. Press, Penyunt.) Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Budiastutik, I., & Rahfiludin, M. Z. (2019). Faktor Risiko Stunting pada anak di Negara Berkembang. *Amerta Nutrition* , Vol. 3 No. 3, 122-129.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. SAGE Publications, Inc.
- Dilago, R., Lumolos, J., & Waworundeng, W. (2018). Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Eksekutif : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* , Vol. 1 No. 1, 4.

- Diniyyah, S. R., & Nindya, T. S. (2017). Asupan Energi, Protein dan Lemak dengan Kejadian Gizi Kurang pada Balita Usia 24-59 Bulan di Desa Suci, Gresik. *Amerta Nutrion* , Vol. 1 No. 4, 341-350.
- Dorisman, A., Muhammad, A. S., & Setiawan, R. (2021). Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* , Vol. 19 No. 1, 71-84.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Publib Administration Research and Theory* , Vol. 22 No. 1, 1-29.
- Fauzan, M. A., Nurmalasari, Y., & Anggunan, A. (2021). Hubungan Status Gizi dengan Prestasi Belajar. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* , Vol. 10 No. 1, 105-111.
- Fauziah, F., & Novandi, D. (2021). Aksi Pencegahan Kasus Stunting di Kota Samarinda Melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PRO-BEBAYA). *Jurnal Riset Inossa* , Vol. 3 No. 2, 76-86.
- Gunawan, A., & Ma'aruf, M. F. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespons Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya Dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). *Journal of Public Sector Innovation* , 1-10.
- Harmiati, Aleksander, Triyanto, D., Maya, M., & Riastuti, F. (2020). Analisis Pemetaan Collaborative Governance dalam Program Keluarga Berencana di Kota Bengkulu. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* , Vol. 9 No. 1, 69.
- Ikram, M. I. (2020). Pendekatan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Kecamatan Manggala. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* , Vol. 3 No. 1, 94-110.
- Ismainar, H., Marlina, H., & Triana, A. (2022). Cegah Stunting Melalui Edukasi Kesehatan di Masa Kehamilan di Kelurahan Rejosari Kota Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Kesehatan Komunitas* , Vol. 2 No. 2, 1-8.
- Kharisma, B. (2014). Good Governance sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* , Vol. 19 No. 1, 9-30.

- Litbangkes, H. (2021). *Angka Stunting Turun di Tahun 2021*. Dipetik Desember 2022, dari Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI: <https://www.litbang.kemkes.go.id/angka-stunting-turun-di-tahun-2021/>
- Maulidah, W. B., Rohmawati, N., & Sulistiyani, S. (2019). Faktor yang berhubungan dengan kejadian Stunting pada Balita di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. *Ilmu Gizi Indonesia* , Vol. 2 No. 2, 89-100.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governnce dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijng di Desa Tebarara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* , Vol. 6 No. 2, 145.
- Nirmalasari, N. O. (2020). Stunting pada Anak: Penyebab dan Faktor Risiko Stunting di Indonesia. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* , Vol. 14 No. 1, 19-28.
- Panggalo, Z. S., Darwis, D., & Hasriana, H. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak di Wilayah Kerja Puskesmas Taraweang Kab. Pangkep. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* , Vol. 15 No. 4, 354-359.
- Piani, I. (2020). Proses Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry* , Vol. 4, 142.
- Praja, Y. I. (2020). *Dinkes Palembang Fokus Turunkan Angka Stunting*. Dipetik Desember 2022, dari Sumsel Terkini: <https://sumselterkini.co.id/kebijakan/dinkes-palembang-fokus-turunkan-angka-stunting/>
- Probohastuti, N. F., & Rengga, A. (2019). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Penurunan Stunting di Kabupaten Blora. *Journal Of Public Policy And Management Review* , Vol. 8 No. 4, 1-16.
- Putri, S. A., & Habibie, D. K. (2022). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Puskesmas Rejosari). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , Vol. 8 No. 21, 457-466.

- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* , Vol. 9 No. 1, 225-229.
- Rahmawati, A., Nurhaeni, I. D., & Kartono, D. T. (2016). Kolaborasi antar Daerah dalam Penyelesaian Konflik antar Nelayan di Perairan Pacitan, Wonogiri dan Gunungkidul. *Paradigma Jurnal Ilmu Administrasi* , Vol. 5 No. 2, 10.
- Saputri, R. A. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Dinamika Pemerintah* , Vol. 2 No. 2, 152-168.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sukanti, S., & Faidati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman. *Caraka Prabhu : Jurnal Ilmu Pemerintahan* , Vol. 5 No. 1, 91-113.
- Susilo, Y. (2015). Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah di Kabupaten Indramayu (Studi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015). *Sinau* , Volume I, No. 01, 42-44.
- Tasruddin, R. (2015). Proses Kolaborasi antar Pemerintah Swasta, dan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Komodifikasi* , Vol. 2 No. 1, 51.
- Wattimena, M. A. (2020). Implementasi Good Corporate Governance, Good Governance dan Kepemimpinan Situasional Terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis* , Vol. 1 No. 2, 197-214.